

**DIFABLE DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN : STUDI KASUS
IKATAN DISABILITAS PURWOREJO (IDP)**

Surani Pungkas Sari
ranipungkasari23@gmail.com

Yuwanto
yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang

ABSTRAKSI

Kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor non formal yang turut berperan aktif dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Begitupula dengan Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) mereka turut aktif dalam memerjuangkan hak-hak disabilitas dengan menuntun dibentuknya peraturan daerah bagi disabilitas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal pembentukan dan kegiatan dari IDP, kemudian bagaimana kedudukan IDP dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan apa saja faktor penghambat IDP dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian tersebut adalah proses terbentuknya IDP terjadi secara *bottom up* yaitu sesuai dengan permasalahan dan aspirasi disabilitas yang ditampung oleh IDP kemudian disampaikan pada pemangku kepentingan dengan berbagai bentuk perjuangan. IDP yang didampingi oleh MPM PDM Kabupaten Purworejo, PC IMM, dan NLR terus mengawal dalam proses pembuatan kebijakan perda disabilitas. IDP memiliki kegiatan yang mengarah pada pengembangan dan penguatan internal serta eksternal IDP. Kedudukan IDP dalam proses pembuatan kebijakan terdapat pada tahap formulasi kebijakan. Isu disabilitas berhasil masuk ke dalam rapat paripurna DPRD 2018 dalam pembahasan ranperda disabilitas. Hambatan yang dialami yaitu dari segi internal pendidikan anggota IDP yang rendah dan dari eksternal IDP berupa masih ada masyarakat yang membatasi diri dengan disabilitas karena stigma negatif terhadap difabel dan kusta.

Kata Kunci : IDP, kelompok kepentingan, proses pembuatan kebijakan

**DIFABLE IN THE POLICY MAKING PROCESS : CASE STUDY
IKATAN DISABILITAS PURWOREJO (IDP)**

Surani Pungkas Sari
ranipungkasari23@gmail.com

Yuwanto
yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Of Politics And Government Of Fisip Undip Semarang

ABSTRACT

Interest groups are one of the non-formal actors who play an active role in influencing the policy making process with the various efforts they make. Likewise with the Purworejo Disability Association (IDP) they actively participated in fighting for disability rights by demanding the establishment of regional regulations for disability. So this study aims to determine the initial formation and activities of the IDP, then how the position of the IDP in influencing the policy-making process and what are the IDP inhibiting factors in influencing the policy-making process.

The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation, and document review. The data obtained is then analyzed by triangulating data sources.

The results of this study are that the process of forming IDP occurs in a bottom up manner that is in accordance with the problems and aspirations of disability that is accommodated by the IDP and then delivered to stakeholders with various forms of struggle. IDPs accompanied by MPM PDM Purworejo Regency, PC IMM, and NLR continued to oversee the process of making disability regulations. IDP has activities that lead to the development and strengthening of internal and external IDPs. The position of the IDP in the policy making process is at the stage of policy formulation. Disability issues successfully entered the 2018 DPRD plenary meeting in the discussion on the disability regional regulation. Constraints experienced are in terms of internal education of IDP members that are low and from external IDPs in the form of still people who limit themselves with disabilities because of the negative stigma towards diffables and leprosy.

Keywords: IDP, interest groups, policy-making process

A. PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratein*” yang berarti tata pemerintahan. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat yaitu *government of the people, by the people, for the people* dimana pemegang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.¹ Maka segala yang dilakukan oleh pemangku kepentingan kembali lagi tujuan dan hasilnya adalah untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis didasarkan pada tiga prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Pada aspek partisipasi publik rakyat diikutsertakan dalam proses pemerintahan termasuk dalam proses pembuatan kebijakan serta aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam penetapan kebijakan. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan salah satunya adalah partisipasi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kepentingan. Munculnya kelompok kepentingan disebabkan karena persamaan tujuan, tuntutan, dan tidak terdapat kebijakan maupun keputusan politik yang sesuai dengan aspirasi, sehingga mereka memerjuangkan kepentingan mereka agar terwujud kebijakan berdasarkan pada aspirasi yang ditampung.

Di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat kelompok kepentingan kaum difabel yang menuntut adanya kebijakan yang pro difabel. Masih terdapat penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selain itu, adanya persepsi yang menganggap lemahnya kaum difabel juga menjadi salah satu pemicu banyaknya disabilitas yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja. Pada dasarnya mayoritas para difabel memiliki latar belakang pendidikan yang rendah karena kemiskinan yang mereka alami.

Oleh karena itu, terdapat suatu organisasi sosial bernama Ikatan Disabilitas Purworejo atau biasa disebut IDP yang didirikan oleh Bapak Simponiarto sebagai suatu perkumpulan atau ikatan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) merupakan salah satu kelompok kepentingan

¹ Dadang Supardan, “Sejarah dan Demokrasi”, *Sosio Didaktika: Social Scienc Education Journal*, 2 (2) 2015, hlm. 126.

yang memiliki tuntutan terhadap hak-hak yang belum mereka peroleh. Selain itu, Ikatan Disabilitas Purworejo juga sebagai wadah untuk memotivasi dan memerjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga memperoleh kesamaan kesempatan, penghidupan, dan partisipasi. Ikatan Disabilitas Purworejo bertujuan pula untuk menjembatani permasalahan yang dialami oleh para penyandang cacat agar bisa memperoleh hak-hak mereka serta sebagai penghubung aspirasi antara difabel dengan Pemerintah Daerah.

Seperti *Long March* yang dilakukan oleh Ikatan Disabilitas Purworejo di Depan Gedung DPRD, didampingi oleh NLR, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Purworejo dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang sekaligus juga diamanahi sebagai pendamping difabel khususnya Ikatan Disabilitas Purworejo. Tujuannya agar lebih diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah sebagaimana masyarakat normal, bahkan diistimewakan dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang inklusi dan ramah terhadap kaum Disabilitas. Konteks kebijakan yang prodifabel dalam *Long March* tersebut menuntut adanya Perda Disabilitas Kabupaten Purworejo dan pemenuhan hak-hak mereka yang berfokus pada pelayanan disabilitas, fasilitas publik bagi difabel, kesempatan kerja bagi difabel, dan ketrampilan bagi difabel.

Melalui organisasi tersebut difabel dapat berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang prodifabel. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada dan terdapat pula keberadaan Ikatan Disabilitas Purworejo sebagai wadah yang menampung disabilitas, peneliti maka tulisan ini akan membahas beberapa poin : *Pertama*, proses pembentukan dan kegiatan IDP. *Kedua*, kedudukan IDP dalam proses pembuatan kebijakan. *Ketiga*, faktor penghambat IDP dalam proses pembuatan kebijakan. *Keempat*, penutup berupa simpulan dan saran.

B. LANDASAN TEORI

B.1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik Kebijakan publik menurut Thomas Day adalah *public policy is whatever governments choose to do or not to do.*² Definisi tersebut memiliki makna yaitu apabila pemerintah memilih membuat maupun menindaklanjuti kebijakan maka harus ada maksud dan tujuan didalamnya. Sebaliknya apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan tindakan maupun mendiamkan, hal tersebut juga merupakan suatu kebijakan pemerintah yang didasari dengan tujuan dan pertimbangan.

Pada kebijakan publik terdapat siklus kebijakan antara lain (1) Tahap identifikasi isu-isu (2) tahap penyusunan agenda (*agenda setting*), (3) Tahap formulasi kebijakan (*policy formulating*), (4) Tahap adopsi/legitimasi kebijakan (*policy adoption*), (5) Tahap implementasi kebijakan , (6) Tahap evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

B.2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi Politik menurut Budihardjo, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi juga dilakukan oleh kelompok kepentingan. Dalam berpartisipasi terdapat relasi antar aktor secara formal ataupun informal di mana mereka memainkan perannya masing-masing. Selain itu terdapat konsep komunitas kebijakan menurut wayne parson antara lain : (1) Adanya aturan, nilai, atau norma yang dikembangkan didalam suatu komunitas kebijakan dapat meningkatkan transaksi antar-anggota dalam jangka waktu tertentu serta mengurangi kemungkinan terjadinya cheating, (2) Komunitas kebijakan dapat menyatukan interaksi antaranggota dalam berbagai issue-area tertentu, (3) Komunitas kebijakan memungkinkan tersedianya informasi yang memadai terutama bagi para anggota yang terlibat dalam suatu kerjasama sekaligus memperbesar kemungkinan melakukan pengawasan, (4) Komunitas dapat mengurangi biaya transaksi

² Edi Soeharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.3.

(*transaction cost*), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pertukaran, yang meliputi biaya untuk memperoleh informasi, melakukan penawaran atau negosiasi, menegakkan dalam keseluruhan proses tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait yaitu ketua, pengurus, anggota IDP, ketua Komisi D, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, PC IMM dan MPM PDM Kabupaten Purworejo, Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan data dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya kemudian juga dilakukan analisis triangulasi dari sumber data yang diperoleh.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

D.1. Proses Pembentukan dan Kegiatan

Ikatan Disabilitas Purworejo atau biasa disebut dengan IDP merupakan organisasi sosial yang berperan sebagai wadah bagi semua jenis disabilitas yang ada di Kabupaten Purworejo untuk menampung aspirasi difabel. Penggagas dibentuknya IDP adalah Simponiarto. IDP awalnya hanya sekedar perkumpulan biasa yaitu berupa arisan bagi disabilitas. Tepat tanggal 11 Juli 2011 IDP resmi dibentuk di kediaman Simponi yaitu di Desa Pelutan RT 2 RW 2 Gebang Purworejo. Ragam disabilitas di IDP meliputi tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, grahita, cacat ganda. IDP tidak membatasi jenis disabilitas apapun yang akan bergabung dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi *volunteer* IDP serta bersungguh-sungguh ingin mengawal disabilitas. Pada tahun 2013 IDP memperoleh dampingan dari Muhammadiyah yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPM PDM) Kabupaten Purworejo dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Purworejo (PC IMM). Memasuki akhir tahun 2014, kemudian terpilih Simponi sebagai ketua IDP periode

2015-2019 kemudian pada tanggal 4 Desember IDP resmi dideklarasikan di pendopo Kabupaten Purworejo.

IDP memiliki kegiatan yang bekerjasama dengan Netherland Leprossy Relief (NLR) sejak tahun 2015 yang membidangi permasalahan kusta, kemudian terdapat kegiatan rutin setiap bulan berupa penguatan organisasi dan motivasi dari pendamping, kegiatan yang sifatnya memberdayakan dan melatih jiwa kewirausahaan yaitu adanya KUBE Jamur, kafe sahabat difa, serta ada kegiatan yang sifatnya tidak terjadwal yaitu berupa undangan kegiatan atau lainnya diluar jadwal kegiatan IDP.

D.2. Kedudukan IDP Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Bentuk Perjuangan IDP. Selain kegiatan yang mengarah untuk internal IDP, juga terdapat upaya IDP untuk memerjuangkan hak difabel dalam proses pembuatan kebijakan antara lain : (1) Aksi *Long March* yang dilakukan oleh IDP bersama dengan organisasi disabilitas lainnya dan didampingi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, UKM, HIMA Universitas Muhammadiyah Purworejo, (2) Dengar pendapat dengan Bupati yang dilakukan yang dilakukan setiap tahun mendekati Hari Disabilitas Internasional, (3) Pada saat HDI, IDP bersama dengan organisasi disabilitas lainnya bersama-sama menyampaikan apapun harapan mereka yang belum terwujud dan menyampaikan kritik atau saran bagi pemerintah, (4) Perjuangan yang sifatnya formal dan non-formal. Kegiatan yang bersifat formal yaitu dari pihak IDP secara resmi membuat surat maupun proposal lalu disampaikan ke instansi yang dituju, sedangkan kegiatan non-formal yaitu IDP dapat menemui para pemangku kepentingan dimanapun tempatnya asalkan bertemu dengan pihak terkait lalu menyampaikan aspirasinya.

Komunitas Kebijakan. Terdapat konsep komunitas kebijakan yang didalamnya memuat beberapa indikator untuk menentukan kriteria IDP sebagai bagian komunitas kebijakan yaitu³ : (1) IDP memiliki aturan, nilai maupun norma yang disepakati bersama dalam bentuk AD/ART. (2) IDP berupaya untuk

³ Wayne Parson, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.5.

menyatukan interaksi antaranggota dengan menyalurkan aspirasi melalui pertemuan rutin maupun pada saat berkumpul membahas kegiatan yang akan dilaksanakan, (3) Ketersediaan sarana informasi yaitu setelah IDP melakukan rapat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, perwakilan dari IDP akan menyampaikan informasi yang diperoleh melalui Grup *Whatsapp* IDP kemudian ditindaklanjuti lagi pada saat rapat berlangsung, (4) IDP memiliki jaringan dengan Muhammadiyah dan juga NLR yang hingga saat ini aktif mendampingi IDP. Pada saat IDP berupaya memiliki legalisasi berbadan hukum, semua proses dan prosedur legalisasi tersebut diurus oleh Muhammadiyah sehingga mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh IDP karena memiliki relasi dengan Muhammadiyah.

IDP terus memantau perkembangan proses pembuatan peraturan daerah disabilitas, melakukan advokasi kepada masyarakat untuk mendukung diwujudkannya peraturan daerah dan membangun jaringan dengan kelompok penyandang difabel di lain daerah agar mampu memperkuat posisi dan kualitas IDP sehingga upaya untuk mendorong pemerintah mewujudkan kebijakan peraturan daerah tersebut bisa segera terwujud.

Dinamika atau Interaksi Aktor. IDP dalam *in-actionnya* pernah melakukan aksi pada tanggal 5 Desember 2016 untuk menuntut hak-hak disabilitas yang belum dipenuhi serta mendukung adanya kebijakan menuju Purworejo inklusi dan ramah disabilitas dengan adanya peraturan daerah disabilitas.

Selain itu konvoy pada tanggal 16 Juli 2017 IDP bersama dengan PC IMM, MPM PDM, menuju Pantai Suwuk Kebumen atas inisiatif NLR yang bertujuan untuk meningkatkan keberadaan IDP di kalangan pemerintah maupun masyarakat serta untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah.

Lalu pada tanggal 27 Desember 2017 IDP melakukan aksi tagih janji agar tuntutan perda ditindaklanjuti. IDP turut mewarnai dinamika proses pembuatan kebijakan hingga keterlibatan IDP sampai pada tahap formulasi kebijakan dimana aspirasi IDP berhasil masuk dalam pembahasan rapat paripurna DPRD membahas ranperda yang telah disusun. Sehingga pada Bulan Mei 2018, perda disabilitas disahkan oleh DPRD Kabupaten Purworejo, dan kemudian pada bulan Agustus 2018 peraturan daerah tersebut diundangkan dengan bunyi Peraturan Daerah

Disabilitas No. 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

D.3. Faktor Penghambat IDP dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Kapasitas Sumberdaya Manusia. Anggota IDP memiliki pendidikan yang rendah dimana berdampak pada : (1) IDP belum paham mengenai bahasa komunikasi politik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang justru hal tersebut mengarah pada bentuk *lobby* dan negosiasi, (2) Pola pikir anggota IDP yang masih beranggapan bahwa suatu kegiatan adalah samadengan uang, (3) Dalam segi internal IDP mengalami kesulitan dalam manajemen organisasi yaitu mengumpulkan anggota IDP yang tidak intens datang pada saat pertemuan rutin serta pada saat aksi *Long March* juga belum seluruhnya anggota IDP mau untuk turun ke jalan.

Pengakuan Pemerintah. Masih ada beberapa oknum dari pemerintah daerah yang kurang suka dengan keberadaan IDP karena persepsinya yang masih memandang bahwa IDP banyak kemauan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat IDP memerjuangkan aspirasi mereka karena masih ada yang belum sepenuhnya mendukung. Antara kedua pihak yaitu IDP dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya satu pemikiran. Sehingga kadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dengan maksud dari Pemerintah Daerah.

Penerimaan Masyarakat. Terdapat masyarakat yang bersinggungan langsung dengan disabilitas sehingga mereka peduli dan mendukung pergerakan disabilitas. Namun, terdapat masyarakat yang masih membatasi diri dengan disabilitas karena difabel adalah orang yang lemah. Terutama di daerah pelosok Kabupaten Purworejo, dimana masih ada yang menderita kusta dan apabila tidak diobati maka akan menyebabkan disabilitas. Persepsi bahwa kusta adalah penyakit menular membuat masyarakat membatasi diri dengan difabel dan orang yang kusta.

E. PENUTUP

E.1. Simpulan

Proses terbentuknya IDP terjadi secara *bottom up* dan IDP memiliki kegiatan yang ditujukan untuk penguatan internal dan juga eksternal organisasi. Kedudukan IDP dalam proses pembuatan kebijakan sampai pada tahap formulasi kebijakan yaitu rancangan peraturan daerah disabilitas masuk dalam pembahasan rapat paripurna DPRD yang dibahas pada tanggal 2, 5, dan 6 Februari 2018.

Faktor penghambat IDP dalam proses pembuatan kebijakan terdiri dari faktor penghambat internal dan juga faktor penghambat eksternal. Hambatan secara internal yaitu dari segi pendidikan anggota IDP rendah, sedangkan hambatan secara eksternal yaitu masih ada beberapa oknum dari pemerintah daerah yang kurang suka dengan keberadaan IDP karena persepsinya yang masih memandang bahwa IDP banyak kemauan. Selain itu dari penerimaan masyarakat terdapat dua pandangan yaitu masyarakat yang bersinggungan langsung dengan disabilitas seperti di pemerintahan dan kalangan pemerhati disabilitas, respon terhadap disabilitas sudah baik dan terdapat masyarakat di daerah pelosok Kabupaten Purworejo yang kurang peduli terhadap difabel karena difabel adalah orang yang lemah.

E.2. Saran

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi anggota IDP bisa dilakukan dengan meningkatkan jejaring relasi. Melalui upaya tersebut maka IDP bisa melakukan kerjasama seperti pelatihan bagi anggota IDP agar melek terhadap teknologi seperti pengoperasian laptop maupun dengan bentuk pelatihan lainnya yang tentunya dilakukan secara bertahap. Selain itu karena IDP juga berjejaring dengan Muhammadiyah, maka IDP bisa membuat kegiatan untuk melatih kemampuan anggota IDP dan melakukan komunikasi dengan Muhammadiyah agar IDP diperkenalkan dengan relasi dari Muhammadiyah serta diikutsertakan dalam kerjasama maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya anggota.

Disamping itu agar anggota tidak lagi berorientasi dengan uang maka dari ketua IDP, NLR, maupun pihak pendamping juga harus intens atau rutin memberikan pendampingan dengan anggota berupa pendekatan baik secara personal maupun pada saat rapat rutin. Pola pikir demikian juga disebabkan karena ekonomi anggota IDP yang rendah maka dari pengurus inti IDP, PC IMM, MPM PDM serta pendamping dari NLR bisa mengusulkan ide dan membuat kegiatan yang menarik seperti anggota IDP dilatih untuk membuat kerajinan atau kreativitas yang nantinya bisa dijual dengan bantuan promosi penjualan dari para jejaring yang dimiliki IDP.

Penguatan manajemen organisasi IDP dapat dilakukan inovasi organisasi yaitu dengan memfasilitasi bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi para anggota, seperti ketua lebih terbuka dan mendengarkan apapun keluhan anggota kemudian dicari solusinya, kemudian lebih meningkatkan keakraban antaranggota yang bisa menimbulkan kepekaan dalam suatu organisasi. Selain itu adanya *reward* atau bingkisan tahunan bagi yang rutin hadir.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Budihardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia.
- Budihardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miaz, Yalvema 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH. UII Press.
- Sufyan, Ahmad. 2015. *Gerakan Sosial Masyarakat Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang*. Skripsi. Rembang: Universitas Airlangga.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj.2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Jurnal/ Karya Ilmiah :

Fadil, Fathurrahman. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah". Banjarmasin: *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol II Edisi 2:256.

Novitasarie, Actavia. 2015. "Politik Pengakuan: Memperjuangkan Kepentingan Kelompok Difabel (Tunanetra) Kota Surabaya". Surabaya: *Jurnal Politik Muda* Vol.4, No 1: 61–70.

Muntoha. 2009. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol 16.

Pratiwi, Oktafiani Catur, 2009. "Policy community di daerah: Studi tentang proses pengajuan usulan pemekaran Kabupaten Banyumas". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian. 2011. "Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan". Bandung: *Jurnal Transdisiplin Sosiologi Komunikasi, dan Ekologi Manusia* Vol. 5, No. 1.

Sagita, Novie Indrawati. 2016. "Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara". Bandung: *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2 No. 2, Oktober:96-106.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Supardan, Dadang. 2015. "Sejarah dan Prospek Demokrasi". Bandung: *Sosio Didaktika: Social Scienc Education Journal*, 2 (2): 126.

Sumber Website Internet :

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-29-tahun-2002/penguatan-komunitas-kebijakan-konsep-urgensi-dan-implikasinya-dalam-proses-perencanaan/> diakses pada 15 Oktober 2017.

<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1890> diakses pada tanggal 31 Mei 2017.

<http://www.kebumeneksPRES.com/2016/12/tuntut-haknya-dipenuhi-puluhan.html> di akses pada 31 Mei 2017.

bappeda.purworejokab.go.id/ diakses pada 15 Mei 2018, 10.43 WIB.

<http://purworejokab.go.id/weblama/news/serba-serbi/2640-ikatan-disabilitas-purworejo-idp-dideklarasikan> diakses pada 28 September 2018 pukul 10.44 WIB.

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-8788-detail-mpm-purworejo-luncurkan-gerakan-shodaqoh-sampah-untuk-berdayakan-difabel.html> diakses pada 27 September 2018 pukul 20.23 WIB.

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/71327/perda-disabilitas-jamin-tak-ada-diskriminasi> diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 19.28 WIB.